

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dianggap sebagai investasi penting dalam durasi panjang untuk setiap negara, dengan kemajuan suatu negara di masa depan dapat dinilai berdasarkan kualitas pendidikan yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, pendidikan adalah sarana utama bagi negara untuk meraih aspirasi nasional. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia, yang aspirasinya tercermin jelas dalam ideologi negara, yaitu menciptakan negara yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan aspirasi ini, Indonesia memerlukan kontribusi dari semua komponen bangsa yang dapat memenuhi amanah dari lima pilar ideologi tersebut. Salah satu strategi yang diadopsi oleh negara dalam mencetak generasi yang handal adalah dengan menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat (Suprpti, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar siswa memiliki kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, moral yang baik, serta keterampilan yang berguna bagi diri mereka sendiri, masyarakat,

bangsa, dan negara. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Setiap manusia mengalami perubahan kualitas hidup yang berbeda-beda dari hari ke hari. Sebagai makhluk yang cerdas dan berbudaya, tentu manusia menginginkan perubahan positif untuk mencapai tujuan hidupnya. Perbedaan kualitas yang diperoleh setiap orang dipengaruhi oleh cara individu tersebut dalam mengatur, merencanakan, dan mengelola setiap kegiatan yang dilakukan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tergantung pada bagaimana individu atau lembaga merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan setiap kegiatan yang dijalankan (Firman, 2020). Pada era perkembangan industri pendidikan yang pesat, isu pembiayaan pendidikan menonjol sebagai tantangan yang multifaset dan memerlukan perhatian serius dari pengelola institusi pendidikan karena isu pembiayaan tidak hanya berhubungan dengan tenaga pendidik dan metode pengajaran, tetapi juga mencakup infrastruktur dan pemasaran serta faktor keuangan lainnya. Dalam manajemen sebuah lembaga pendidikan, fungsi keuangan adalah integral dan tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. (Winarsih, 2016).

Kewenangan pemerintah lokal terhadap manajemen pendidikan di setiap wilayah mencakup regulasi biaya pendidikan. Aktivitas penbiayaan ini terkait dengan akuisisi pendapatan yang diperoleh serta cara biaya tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan dalam eksekusi berbagai program pendidikan. Lembaga pendidikan mendapatkan sumber biaya dari beberapa jalur, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi dari masyarakat atau orang tua siswa. Manajemen biaya pendidikan perlu memperhatikan berbagai komponen penting yang mempengaruhi alokasi dan penggunaan dana yang mencakup: (1) penilaian keperluan pendidikan, (2) distribusi dari berbagai segi biaya, (3) evaluasi asal-usul biaya, dan (4) pengawasan keuangan. Keempat elemen ini perlu diatur secara terperinci guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Komariah (2018), jika strategi pembiayaan pendidikan diimplementasikan dengan maksimal, maka proses pendidikan diharapkan dapat berlangsung secara efisien.

Pondok pesantren di Indonesia merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang autentik, memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan nasional. Institusi ini bertanggung jawab dalam menyalurkan pengetahuan tentang Islam, mempertahankan tradisi Islam, menghasilkan ulama, serta menyebarkan ajaran Islam. Salah satu unsur krusial dalam keberhasilan pendidikan di pesantren adalah manajemen yang efektif (Muhtarom, 2005). Dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pondok pesantren disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4), yang berbunyi: "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis." Selain itu, Pasal 30 ayat (3) menyatakan: "Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal." Dengan demikian, pondok pesantren diakui sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang dapat diselenggarakan melalui berbagai jalur pendidikan di Indonesia.

Dari analisis dan interpretasi berbagai ketentuan dalam UU Sisdiknas,

kita mengamati peran penting pondok pesantren dalam struktur pendidikan nasional. Berdasarkan Pasal 3 UU Sisdiknas, terungkap bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, mereka diharapkan menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Norma-norma tersebut telah efektif berlaku dan diterapkan dalam sistem manajemen pondok pesantren.

Manajemen keuangan dalam lingkungan pondok pesantren adalah komponen krusial dari manajemen lembaga pendidikan yang berperan penting dalam menjamin kelangsungan aktivitas di pondok pesantren. Seperti pada manajemen pendidikan secara umum, proses manajemen keuangan di pondok pesantren idealnya melibatkan tahapan perencanaan, organisasi, instruksi, koordinasi, serta pengawasan atau kontrol. Dalam kerangka pengelolaan keuangan, aktivitas yang dilakukan mencakup perolehan serta penentuan berbagai sumber pembiayaan, penggunaan biaya, pelaporan, audit, dan akuntabilitas. Saat ini, pondok pesantren, yang sebelumnya dipandang sebagai alternatif dalam bidang pendidikan, telah berkembang dan menduduki posisi yang lebih tinggi sebagai institusi pendidikan yang memberikan solusi dan memiliki peran substantif. Pondok pesantren kini diakui sebagai institusi pendidikan unik yang secara konsisten berperan dalam membina dan membentuk karakter serta kepribadian generasi muda yang akan memimpin

masa depan bangsa (Madjid, 1997).

Manajemen pembiayaan pendidikan di pondok pesantren memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama yang bertujuan mencetak generasi berakhlak, pondok pesantren menghadapi tantangan dalam mengelola dana yang sering kali berasal dari donasi, infak, dan wakaf. Pengelolaan yang profesional dan akuntabel dapat membantu pesantren untuk mengalokasikan dana secara efektif, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan menjaga kesejahteraan tenaga pengajar, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal (Nawawi, 2017)..

Sementara itu, Hasan (2019) menekankan pentingnya pengembangan sumber pendanaan berkelanjutan untuk pondok pesantren, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga filantropi dan pemanfaatan dana wakaf secara produktif. Dengan strategi pembiayaan yang baik, pesantren dapat berinvestasi dalam teknologi dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia modern. Manajemen pembiayaan yang tepat juga memungkinkan pesantren menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan para donatur dalam mendukung pendidikan pesantren.

Fenomena manajemen pembiayaan pendidikan di pondok pesantren mencakup berbagai tantangan dan strategi dalam pengelolaan sumber daya. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi keberlanjutan dana, transparansi penggunaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Pondok pesantren sering

bergantung pada sumbangan, biaya pendidikan, dan dukungan pemerintah, yang memerlukan pengelolaan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 pasal 3 tentang yang menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, yaitu: 1) standar kompetensi lulusan, 2) standar isi, 3) standar proses. 4) standar penilaian, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan 8) standar pembiayaan.

Yayasan Nurul Khoir Jambi memiliki Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an yang sebelumnya telah menaungi beberapa lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sementara itu, pondok pesantren didirikan pada tahun 2018 dan berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Perbedaan inilah yang menjadi salah satu alasan penulis merasa tertarik melakukan penelitian di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Kota Jambi yang mana sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan hanya berasal dari sumbangan swasta tidak tetap dan iuran pendidikan yang dibayarkan wali santriwan/wati tanpa ada dana bantuan dari pemerintah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana pembiayaan dalam entitas ini memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan kebutuhan masyarakat terlepas dari tantangan dan problematika yang dihadapi.

Pondok pesantren tahfidzul Quran adalah lembaga pendidikan Islam yang mengutamakan penghafalan Al-Quran dan pemahaman ajaran-ajarannya. Di dalam pesantren, santri mengikuti rutinitas harian yang disiplin, termasuk

shalat berjamaah dan belajar kitab kuning, sambil mengembangkan akhlakul karimah. Selain fokus pada hafalan, pesantren ini juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda dengan menekankan nilai-nilai keagamaan dan keterlibatan sosial. Tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang tidak hanya mahir dalam penghafalan, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam, siap menghadapi tantangan zaman, dan menjadi teladan dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi batasan-batasan masalah, yang mengacu pada isu utama dari permasalahan yang masih bersifat umum. Penentuan batasan ini diatur berdasarkan prioritas dan kepentingan dari isu yang hendak diatasi. Area fokusnya dapat mencakup satu atau lebih domain yang berkaitan dengan konteks sosial. Dalam penelitian yang dijalankan, penulis memilih sebagai objek penelitian praktik pengelolaan biaya pendidikan yang dilakukan oleh kepala Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Kota Jambi, berfokus pada implementasi teori-teori yang telah ada dalam manajemen pembiayaan. Studi ini meliputi tiga komponen utama dalam pembiayaan pendidikan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana biaya pendidikan dikelola dalam konteks pendidikan di pondok pesantren tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan manajemen biaya pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Jambi?

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen biaya pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Jambi?
3. Bagaimana evaluasi manajemen biaya pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis tentang:

1. Perencanaan manajemen biaya pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Jambi
2. Pelaksanaan manajemen biaya pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Jambi
3. Evaluasi manajemen biaya pendidikan di pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Khoir Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki sejumlah manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik, khususnya dalam ranah kajian tentang manajemen pembiayaan pendidikan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga yang dapat dijadikan referensi atau pertimbangan bagi pembaca umum dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pembiayaan.
3. Secara Kelembagaan, penelitian ini berkontribusi sebagai bahan pemikiran

dan masukan yang bermanfaat bagi pondok pesantren dalam memahami manajemen pembiayaan pendidikan, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di pondok pesantren.